

**PENGUMUMAN**  
**LOWONGAN INDIVIDUAL KONSULTAN**  
**TENAGA SISTEM DATABASE (*DATABASE SYSTEM SPECIALIST*)**  
**SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI**  
**HIBAH INEY Grant No. TF0A7565**

---

No. 02/UKPBJ.ST.347/06.05/09/2022

---

Pada tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* telah terbit. Perpres tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga dalam percepatan penurunan *stunting* sesuai target RPJMN 14% pada tahun 2024. Pada Perpres No. 72 Tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang strategis yaitu sebagai Wakil Ketua Pengarah Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Wakil Ketua Pelaksanan Bidang Perencanaan Pemantauan, dan Evaluasi. Kementerian PN/Bappenas memanfaatkan program *Program for Result* yang didanai oleh Bank Dunia didukung oleh hibah multi-donor *Global Financing Facility (GFF)*. Dalam rangka mendukung peran Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung pelaksanaan Perpres 72 tahun 2021 dan mencapai target *stunting* 14% tahun 2024 dibutuhkan segera tenaga analisis data dengan kualifikasi sebagai berikut:

**1. Tenaga Sistem Database (Database System Specialist)**

**Kualifikasi:**

- a. Untuk posisi ini dibutuhkan tenaga dengan latar belakang pendidikan minimal lulusan sarjana (S1) Informatika, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Fisika, atau Matematika.
- b. Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus.
- c. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- d. Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan).
- e. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
- f. Memiliki Berpengalaman 5 tahun sebagai Programmer, dibuktikan dengan referensi dan kontrak kerja
- g. Bersedia bekerja di luar jam kantor dan dalam jadwal ketat
- h. Memiliki pengalaman mengerjakan pemrograman dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan dapat dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan/sistem/dashboard/website yang dikembangkan yang disampaikan melalui tautan dan atau salinan kontrak kerja:
- i. Lebih diutamakan pernah membangun sistem berskala besar (integrated system) dapat dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan/tautan hasil pekerjaan
- j. Lebih diutamakan pernah membangun Business Intelligence, dapat dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan/tautan hasil pekerjaan
- k. Lebih diutamakan pernah bekerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan/tautan hasil pekerjaan

Lamaran dikirim melalui e-mail: [ulp@bappenas.go.id](mailto:ulp@bappenas.go.id)

dengan subject: **DSS-INEY\_Nama Pelamar**

Pelamar agar mengirim berkas lamaran disertai dengan data pendukung yang terdiri dari:

1. Dokumen Administrasi, Teknis dan Biaya (form terlampir).
2. Copy ijazah dan transkrip nilai.

3. **Bukti pembayaran pajak.**
4. **Refrensi/Bukti kontrak.**

**DEADLINE 23 September 2022 pukul 17.00 WIB,  
ditujukan kepada :  
Pokja I UKPBJ Kementerian PPN/Bappenas**

Jakarta, 9 September 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**TENAGA SISTEM DATABASE (DATABASE SYSTEM SPECIALIST)**  
**SEKRETARIAT PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI**

**A. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya percepatan perbaikan gizi di Indonesia. Hasil SSGBI tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan prevalensi *stunting* (pendek) pada anak bawah lima tahun (balita) dari 30,8 persen (Riskesmas 2018) menjadi 27,3 persen. Demikian halnya dengan proporsi balita yang mengalami *wasting* (kurus) menurun dari 10,2 persen (Riskesmas 2018) menjadi 7,4 persen (SSGBI 2019). *Stunting* dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai dari bayi dalam kandungan sampai bayi berusia 2 (dua) tahun selain berdampak pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Anak yang mengalami *stunting* juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita penyakit tidak menular (PTM).

Pada tanggal 12 Juli 2017, Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk pencegahan *stunting*. Rapat memutuskan bahwa upaya pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi perlu dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Upaya penurunan dan pencegahan *stunting* ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020.

Pada tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* telah terbit. Perpres tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga dalam percepatan penurunan *stunting* sesuai target RPJMN 14% pada tahun 2024. Pada Perpres No. 72 Tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang strategis yaitu sebagai Wakil Ketua Pengarah Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan Pemantauan, dan Evaluasi. Selaras dengan fungsi utama Kementerian PPN/Bappenas, tugas dan tanggung jawab pada Perpres No. 72 Tahun 2021 yaitu mendukung pemantauan dan evaluasi melalui sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan *Stunting*, serta menyusun platform berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk mempercepat upaya penurunan *stunting*, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanfaatkan kembali instrumen Program untuk Hasil atau *Program-for-Results* (PforR) *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) Bank Dunia selama periode 2022-2023. Pelaksanaan PforR INEY akan didukung oleh komponen *Investment Project Financing* (IPF) yang dibiayai oleh hibah multi-donor *Global Financing Facility* (GFF). Komponen IPF akan digunakan untuk mendukung investasi yang bersifat katalitik untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan dan memperkuat sistem implementasi yang akan memberikan dasar pada reformasi jangka panjang dan kapasitas pelaksanaan yang berkelanjutan.

Untuk pelaksanaan komponen hibah GFF di Kementerian PPN/Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2022-2023 akan difokuskan pada: (1) penguatan kapasitas sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran nasional; (2) penguatan kapasitas advokasi kebijakan dan program gizi di tingkat nasional dan daerah; (3) peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

untuk penurunan *stunting*; (4) peningkatan kapasitas revidi laporan kinerja anggaran; (5) penguatan koordinasi Sekretariat Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG); (6) penguatan revidi teknis kebijakan dan program pencegahan *stunting* dan kesehatan ibu dan anak; dan (7) penyediaan dukungan dalam *knowledge platform* untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran integrasi program untuk direplikasikan.

Sebagai dukungan dalam pelaksanaan tugas tersebut, dibutuhkan tenaga sistem database yang mampu melakukan integrasi sistem *database stunting* terpadu dan menyiapkan *executive dashboard* percepatan penurunan *stunting*. *Executive dashboard* perlu disiapkan untuk dapat mengintegrasikan sistem yang ada yaitu sistem KRISNA, sistem monitoring dan evaluasi, dan sistem yang terkait *stunting* lainnya yang ada di Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu, *executive dashboard* ini perlu dikembangkan untuk dapat memetakan kegiatan, anggaran, dan *output* dari mitra dan *networks* percepatan penurunan *stunting*.

Tenaga ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komponen A.3 pada *Grant Agreement* (GA) poin a: Penguatan Kapasitas Sinkronisasi Sistem Perencanaan.

## **B. Tujuan**

Posisi ini bertanggung jawab untuk membantu Bappenas dalam melakukan integrasi sistem yang ada pada Kementerian/Lembaga serta *networks* dan menyiapkan *executive dashboard* percepatan penurunan *stunting*.

## **C. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Merancang desain *executive dashboard* pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.
2. Merancang pengembangan *dashboard* beserta fitur yang dapat menunjukkan detail data indikator pada program percepatan penurunan *stunting*.
3. Integrasi sistem dengan sistem KRISNA, sistem monitoring dan evaluasi dan sistem terkait *stunting* lainnya yang ada di Kementerian/Lembaga maupun sistem di *Networks*.
4. Bertanggung jawab dalam mengimplementasikan elemen visual dimana pengguna dapat melihat dan berinteraksi di dalam *dashboard*.
5. Penugasan lain yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

## **D. Keluaran**

1. Rencana kegiatan Tenaga Sistem *Database*
2. Desain *executive dashboard* percepatan penurunan *stunting*
3. *Executive Dashboard* percepatan penurunan *stunting*
4. Laporan kegiatan dan dokumen dukungan lain sesuai penugasan dari PIU

## **E. Syarat dan Kualifikasi**

Persyaratan:

1. Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Lainnya, meliputi:
  - a) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;

- b) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  - c) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
  - d) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
2. Lebih diutamakan berusia maksimal 40 tahun
  3. Berpengalaman 5 tahun sebagai Programmer, dibuktikan dengan referensi dan kontrak kerja
  4. Bersedia bekerja di luar jam kantor dan dalam jadwal ketat
  5. Memiliki pengalaman mengerjakan pemrograman dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan dapat dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan/*dashboard*/*website* yang dikembangkan yang disampaikan melalui tautan dan atau salinan kontrak kerja:
    - a. Lebih diutamakan pernah membangun sistem berskala besar (*integrated system*) dapat dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan/tautan hasil pekerjaan
    - b. Lebih diutamakan pernah membangun *Business Intelligence*, dapat dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan/tautan hasil pekerjaan
    - c. Lebih diutamakan pernah bekerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan/tautan hasil pekerjaan

Pendidikan:

Untuk posisi ini dibutuhkan tenaga dengan latar belakang pendidikan minimal lulusan sarjana (S1) Informatika, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Fisika, atau Matematika.

## F. Lokasi Kegiatan

Kantor Sekretariat Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Jl. Ki Mangunsarkoro No.29, RT.1 RW.04, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

## G. Pembiayaan dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) orang Tenaga Sistem *Database* Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Hibah INEY) sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) termasuk pajak dan akan dibiayai melalui dana yang bersumber dari anggaran Hibah INEY *Grant* No.TF0A7565 pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2022 - 2023. Pelaksanaan kegiatan Tenaga Sistem *Database* pada Sekretariat Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai dari bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2023 yang dibebankan kepada MAK 52219, dengan pembayaran setiap bulan sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan kehadiran (*time based*) dan laporan bulanan. Kinerja Tenaga Sistem *Database* akan dievaluasi setiap enam bulan. Evaluasi pada tahun 2022 akan dilakukan pada akhir tahun.

## H. Pelaporan

Tenaga Sistem *Database* diminta untuk menyampaikan laporan bulanan yang memuat proses kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, antara lain meliputi rencana pengembangan *dashboard*, *progress* pengembangan *dashboard*, dan/atau kegiatan lainnya yang terkait. Laporan bulanan diserahkan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya sebagai dasar pembayaran selain bukti kehadiran.

Tenaga Sistem Database juga diminta untuk menyusun laporan substansi yang terdiri atas laporan awal, tengah dan akhir dengan rincian sebagai berikut.

Tahun	Output
2022	Laporan awal mencakup pemetaan kebutuhan dan rencana pengembangan pengembangan <i>executive dashboard</i> , serta indikator – indikator yang ada di dalamnya, paling lambat 1 bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan tengah mencakup progres pengembangan <i>dashboard</i> dan progres integrasi sistem, paling lambat pada pertengahan periode kontrak.
	Laporan akhir mencakup hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan <i>executive dashboard</i> yang telah terintegrasi dengan internal Bappenas dan Lintas K/L, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2023	Laporan awal mencakup pemetaan kebutuhan dan rencana pengembangan <i>executive dashboard</i> tahun 2023, integrasi dengan lintas sektor lainnya yang belum tertangkap periode sebelumnya, serta indikator – indikator yang ada di dalamnya, paling lambat 1 bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan tengah mencakup progres pengembangan <i>dashboard</i> , pemeliharaan <i>dashboard</i> dan progres integrasi sistem tahun 2023, paling lambat pada pertengahan periode kontrak.
	Laporan akhir mencakup hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan <i>executive dashboard</i> yang telah terintegrasi dengan sistem K/L dan <i>networks</i> , paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.

#### I. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN V Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Satker Kementerian PPN/Bappenas.

#### J. Jadwal Kegiatan

Kontrak kegiatan berdasarkan waktu atau kehadiran (*time based*) dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

No	Aktivitas	2022	2023			
		TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Penyusunan rencana kegiatan pengembangan dashboard executive					
2	Rencana pengembangan <i>dashboard executive</i> dan rencana sistem integrasi metode reuiu program stunting					
3	Penyusunan dan pengembangan <i>dashboard</i> dan menambah fitur elemen visual untuk interaksi pengguna.					

No	Aktivitas	2022	2023			
		TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
4	Finalisasi dan feed back pengembangan dashboard					
5	Penugasan lain yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.					

# BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

---

## LAMPIRAN 1 : SURAT PENAWARAN

### A. BENTUK PENAWARAN ADMINISTRASI

CONTOH

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Lampiran : \_\_\_\_\_

Kepada Yth.:  
Pokja Unit Kerja Pengadaan Baran dan Jasa  
di  
\_\_\_\_\_

Perihal: Penawaran Administrasi \_\_\_\_\_ *[nama pekerjaan diisi oleh Penyedia]*

Sehubungan dengan Pengumuman Seleksi Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_  
dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi untuk  
pekerjaan \_\_\_\_\_ *[diisi oleh Penyedia]* dengan Total Penawaran Biaya  
sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ).

Penawaran Administrasi ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang  
tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan  
tanggal *30 Juni 2022*

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Penawaran Administrasi ini kami  
lampirkan :

1. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
  - a. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari:
    - 1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
    - 2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;
    - 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
    - 4) Jadwal penugasan tenaga ahli;
  - b. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:
    - 1) Daftar Riwayat Hidup;
    - 2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan;
2. Dokumen penawaran biaya, yang terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi Penawaran Biaya
3. Data Kualifikasi, dan
4. *[Dokumen lain yang dipersyaratkan]*

Dengan disampaikannya Penawaran Administrasi ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan  
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

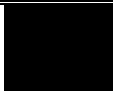


A. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI<sup>1</sup>

CONTOH

**JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI**

No.	Nama Tenaga Ahli	Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok) <sup>2</sup>												Orang Bulan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		n
1															
2															
n															
											<b>Total</b>				



Masukan Penuh-Waktu



Masukan Paruh-Waktu

<sup>1</sup> Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.  
<sup>2</sup> Masukan personil dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.

**B. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI**

CONTOH

**Daftar Riwayat Hidup**

1. Posisi yang diusulkan : \_\_\_\_\_
2. Nama Tenaga Ahli : \_\_\_\_\_
3. Tempat/Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_
4. Pendidikan (Lembaga pendidikan,  
tempat dan tahun tamat belajar,  
dilampirkan rekaman ijazah ) : \_\_\_\_\_
5. Pendidikan Non Formal : \_\_\_\_\_
6. Penguasaan Bahasa Inggris  
dan bahasa Indonesia : \_\_\_\_\_
7. Pengalaman Kerja<sup>1</sup>  
Tahun ini \_\_\_\_
  - a. Nama Pekerjaan : \_\_\_\_\_
  - b. Lokasi Pekerjaan : \_\_\_\_\_
  - c. Pengguna Jasa : \_\_\_\_\_
  - d. Uraian Tugas : \_\_\_\_\_
  - e. Waktu Pelaksanaan : (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal  
bulan tahun)
  - f. Posisi Penugasan : \_\_\_\_\_
  - g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : \_\_\_\_\_Tahun sebelumnya
  - a. Nama Pekerjaan : \_\_\_\_\_
  - b. Lokasi Pekerjaan : \_\_\_\_\_
  - c. Pengguna Jasa : \_\_\_\_\_
  - d. Uraian Tugas : \_\_\_\_\_
  - e. Waktu Pelaksanaan : (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal  
bulan tahun)
  - f. Posisi Penugasan : \_\_\_\_\_
  - g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : \_\_\_\_\_dst.

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

---

<sup>1</sup> Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

\_\_\_\_\_, 20\_\_

Yang membuat pernyat

(\_\_\_\_\_)

*[nama jelas]*

C. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

CONTOH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi \_\_\_\_\_ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ sampai dengan bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ dengan posisi sebagai tenaga ahli \_\_\_\_\_.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Yang membuat pernyataan,

( \_\_\_\_\_ )

*[nama jelas]*

LAMPIRAN 3 : DOKUMEN  
PENAWARAN BIAYA

A. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

CONTOH

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

No.	Uraian	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	_____
	Sub-total	_____
	Total	_____
Terbilang: _____		

